

**PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN (PDMP) DI DESA
KEPENUHAN HULU KECAMATAN KEPENUHAN HULU KABUPATEN ROKAN
HULU**

Oleh: **Alfikar** atas bimbingan **Muhammad Ridwan**.

fikar.alpi@yahoo.com/[085278236600](tel:085278236600)

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Panam Pekanbaru

ABSTRACT

This research is motivated by the program to handle the backward villages and rural food insecurity in Rokan Hulu by a decree of Rokan Hulu in 2011 . In this regard certainly drawn up plans to be realized . However , what has been planned that the results have not been able to reach the target . Fullness of the Upper Village is one of villages in a highly visible application of this program has not been implemented at all . There is only a stretch of paddy fields which no crop at all . Then , good cooperation between the government and the public has not created properly in terms of the implementation of this program . Coupled with the standards , orders and employment targets are not clear so people are reluctant to participate .

The purpose of this study was to megetahui implementation of the planning process to determine the implementation of the Food Program Independent Village in the Upper Village Fullness why not go well . To find out what the barriers are affecting Independent Village Food Programme in the Fullness of the Upper Village that has not done well .

The results of this study indicate that : 1) the implementation of the Independent Village Food Program have not been realized in accordance with the planned target . 2) obstacles on the ground such as land availability , budget , executive and public attitudes encountered in the implementation process can not be properly addressed by the government . 3) communication between the Government and Farmers as the executor has not been effective . 4) the structure and direction of the work is not yet clear as monitoring and implementing government has yet to convince the public that people are reluctant to participate in the implementation of this program .

Keyword : development , agricultural development and implementation

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan wilayah merupakan program nasional yang saat ini dipacu oleh Indonesia. Hal tersebut merupakan upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat nasional Indonesia. Sektor pertanian merupakan salah satu agenda pembangunan tersebut dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian bangsa. Hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pembangunan di sektor ini dapat dikatakan berhasil apabila pengembangan usaha pertanian, sumber daya manusia yang handal dan berkualitas serta didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana dapat terpenuhi dengan baik.

Apa yang menjadi agenda ataupun program dari pemerintah pusat tentu juga menjadi program bagi pemerintah daerah. Hal ini yang disadari oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Selain, menjadi program dari Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan ketahanan pangan di Riau hal ini juga menjadi program bagi Pemerintah kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang pangan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda dari perencanaan yang dibuat. Permasalahan yang terjadi dalam hal pelaksanaan program tersebut diantaranya adalah perencanaan yang dibuat tidak sesuai dengan potensi yang ada di lapangan. Permasalahan yang lebih kronis lagi dalam pelaksanaan program ini adalah bisa dikatakan tidak terlaksana sama sekali. Fakta di lapangan menunjukkan yang nampak wujud nyata di lapangan hanyalah lahan persawahan yang tidak pernah ditanami padi sama sekali. Sementara, target dari perencanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Kepenuhan Hulu ini pada tahun 2012 adalah dalam setahun itu panennya sudah ada dua kali.

1.2 Tinjauan Pustaka

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh **George C. Edwards dalam Winarno 2007:174-202**, ia menyatakan ada empat faktor yang saling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang bekerja secara simultan dan berinteraksi, yaitu:

1. Komunikasi

Menurut Edwards persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Berhubungan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan publik, ketersediaan sumber daya, sikap dan daya tanggap pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

2. Sumber-sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai disertai keahlian-keahlian, fasilitas dan informasi mengenai kebijakan-kebijakan program baru.

3. Kecenderungan-kecenderungan (sikap)

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Kesiapan dan kesiapan dari para implementator dalam penyelesaian kebijakan, kecakapan pelaksanaan tidak cukup tanpa kesiapan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *standard operating procedures* (SOP) dan fragmentasi.

Hak sebuah desa dalam hal pembangunan seperti yang digambarkan oleh **Haw Wijadja, 2003: 23** dalam otonomi desa adalah desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Untuk melakukan otonomi desa, maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan. Untuk itu, tahap awal ketiga potensi tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketiga potensi itu saling berkaitan dan bergantung. Potensi alam yang besar dan bernilai tidak akan bertahan lama/langgeng apabila tidak dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan benar. Pengelolaan yang baik dan benar adalah pengelolaan yang berprinsip pada pembangunan yang berkesinambungan dan kelestarian hidup.

1.3 Permasalahan

Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan ataupun program yang dirancang oleh pemerintah masalah hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya adalah hal yang tak bisa dihindari. Sama halnya untuk pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan diterapkan di Desa Kepenuhan Hulu. Hambatan yang terjadi di lapangan mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi lingkungan, pelaksana yang kurang termotivasi untuk terlibat dalam hal ini petani/masyarakat, serta ketegasan pemerintah dalam memberikan instruksi mengenai program ini membuat pelaksanaannya jalan ditempat. Hingga dengan permasalahan demikian sampai saat ini pelaksanaannya tidak berjalan sama sekali.

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Kepenuhan Hulu yang belum berjalan dengan baik
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang mempengaruhi Program Desa Mandiri Pangan di Desa Kepenuhan Hulu sehingga belum terlaksana dengan baik.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah seperti terdapat pada table berikut:

Table 3. Daftar Nama Informan

No	Nama Informan	Jumlah
1.	Sekretaris dan UPTD Dinas Pertanian Kabupaten Rokan Hulu untuk Desa Kepenuhan Hulu	2 orang
2.	Camat Kepenuhan Hulu	1 orang
3.	Kepala Desa Kepenuhan Hulu	1 orang
4.	Rumah Tangga sasaran program PDMP/petani	2 orang

1. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara, yaitu merupakan proses tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Fokus yang diwawancarai adalah masalah pelaksanaan yang tidak berjalan dan hambatan yang terjadi.
- b. Observasi, melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti dari data tentang pertanian khususnya di bidang pangan yang terdapat di Desa Kepenuhan Hulu.
- c. Dokumentasi, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, seperti peraturan daerah dan peraturan Bupati.

2. Teknik analisa data

- a. Reduksi, yaitu dimulai dari kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber di lapangan untuk kemudian diolah menjadi bahan dalam pemaparan/deskripsi permasalahan yang diteliti.
- b. Deskripsi/penyajian data, yaitu pemaparan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang berupa masalah, fenomena dan data konkrit.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu penarikan suatu sudut pandang secara umum berdasarkan permasalahan yang telah disajikan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Latar Belakang Perencanaan Program Desa Mandiri Pangan

Program Desa Mandiri Pangan (PDMP) merupakan program yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada akhir tahun 2011 untuk tahun anggaran pelaksanaan 2012 dengan tujuan “ untuk mewujudkan Rokan Hulu sebagai swasembada beras pada tahun

2013". Selain itu, program ini dibentuk atas dasar evaluasi bahwa di Rokan Hulu sendiri masih banyak terdapat desa tertinggal dan rawan pangan.

Melalui Surat keputusan Bupati Rokan Hulu nomor 383 tahun 2010 pada tanggal 30 Juli 2010 lalu, telah dibentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi Desa Tertinggal. Hasil verifikasinya, desa sangat maju ada 19 desa, desa maju 83 desa, desa tertinggal 34 desa dan desa sangat tertinggal 10 desa, dan desa yang masih kategori tertinggal sebanyak 44 desa.

Hasil verifikasi tersebutlah yang menjadi latar belakang adanya program ini. Terutama untuk sepuluh desa sangat tertinggal. Pelaksanaan yang telah dilakukan untuk sepuluh desa inipun belum dapat berjalan secara efektif. Di Desa Kepenuhan Hulu contohnya, target pada tahun 2012 minimal sudah ada penanaman padi dengan dua kali panen. Namun, faktanya tidak terjadi sama sekali. Sementara untuk pelaksanaan di Sembilan desa lainnya sudah ada panen meskipun sekali. Adapun jumlah desa tertinggal yang menjadi sasaran Program Desa Mandiri Pangan sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini;

Tabel 3.1 Jumlah Desa tertinggal di Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama Desa	Jarak ke Kota	Kondisi
1.	Sungai Kuti	28 km	Tertinggal
2.	Bangun Purba Barat	27 km	Tertinggal
3.	Lubuk Kerapat	44 km	Tertinggal dan rawan pangan
4.	Kepenuhan Hulu	30 km	Rawan pangan
5.	Karya Mulia	38 km	Rawan pangan
6.	Sialang Jaya	42 km	Rawan pangan
7.	Simpang Harapan	39 km	Rawan pangan
8.	Pasir Makmur	35 km	Tertinggal
9.	Masda Makmur	36 km	Rawan pangan
10.	Serombou Indah	32 km	Tertinggal dan rawan pangan

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012

Proses penetapan desa-desa yang termasuk dalam program ini merupakan hal yang cukup sulit bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Pasalnya, jika desa yang klasifikasinya hanya tergolong miskin yang menjadi acuan, maka akan sulit dalam tahap pelaksanaan. Karena didalam sebuah perencanaan tidak hanya melihat kondisi nyata daerah akan tetapi juga potensi serta sumber daya baik alam maupun manusianya. Apalagi untuk Program Desa Mandiri Pangan ini, tentunya harus didukung oleh kondisi alam, masyarakat serta cuaca.

3.2 Tujuan Program Desa Mandiri Pangan

Program Desa Mandiri Pangan yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memuat tujuan:

1. Untuk mewujudkan perencanaan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2013 yakni “mewujudkan Rokan Hulu sebagai swasembada beras tahun 2013”.
2. Menciptakan kemandirian dan kemajuan untuk desa-desa yang tergolong tertinggal dan rawan pangan, hingga desa-desa tersebut tidak lagi banyak ketergantungan pada Pemerintah Kabupaten.
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam mengenali potensi dan kemampuan, sekaligus mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan menuju kemandirian.
4. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

3.3 Proses Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Kepenuhan Hulu

Pelaksanaan merupakan tahap kedua setelah perencanaan dilakukan. Pelaksanaan pembangunan pertanian di desa kepenuhan hulu dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian sebagai instansi teknis dibantu dengan Penyuluh Lapangan Pertanian (PPL) dan petani.

1. Lokasi

Kondisi lahan untuk persawahan merupakan factor penting yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah dalam menetapkan lokasi persawahan. Alasan utama penetapan lokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hulu adalah untuk mengangkat status desa yang telah diverifikasi sebagai desa tertinggal ataupun desa yang berstatus desa rawan pangan menjadi mandiri dan bisa menghasilkan dengan potensi sumber daya yang ada.

2. Jenis Tanaman

Jenis tanaman yang dipilih untuk Desa Kepenuhan Hulu adalah tanaman padi sawah. Alasan dipilihnya padi sawah ini adalah kondisi di lapangan yang mendukung, kemudian hemat lahan, dalam setahun itu bisa dilakukan penanaman berkali-kali dan panen.

3. Hasil

Hasil dari perencanaan yang telah dilaksanakan dalam waktu lebih kurang setahun dapat dilihat pada beberapa aspek seperti berikut:

3.1 Koordinasi Antar Pelaksana

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan tidak akan pernah terlepas dari yang namanya koordinasi atau kerjasama antar berbagai pihak pelaksana yang terkait pada bidang tersebut. Sesuai dengan persyaratan pelaksanaan kebijakan bahwa organisasi yang bertindak sebagai pelaksana dari sebuah kebijakan tentu harus memiliki struktur kerja yang mengatur hubungan

organisasional. Pelaksanaan sebuah kebijakan tidak cukup dilaksanakan oleh satu organisasi tunggal. Akan tetapi, juga akan melibatkan beberapa organisasi pendukung yang terkait.

Pada proses pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan yang terdapat di beberapa desa di Kabupaten Rokan Hulu memang banyak melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Pertanian, organisasi perangkat desa terkait serta masyarakat/petani sebagai pelaksana yang urgen.

Mekanisme kerjasama antar pelaksana itu sendiri dalam mewujudkan program ini adalah sebagaimana diterangkan oleh Kepala Badan Tanaman Pangan Ir. Ruslam dalam wawancara yang telah dilakukan,

...dalam hal koordinasi pelaksanaan antarpelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program ini mekanisme kerjanya itu adalah terbagi dua. Pertama, pelaksana sebagai pengawas, seperti Dinas pertanian, Camat, dan PPL. Kedua, sebagai pelaksana, seperti Kepala Desa selaku Ketua Tim Pangan Desa dan pendamping serta petani. Petani melakukan penanaman padi, jika terdapat permasalahan atau ada yang kurang baik sarana maupun prasarana di dalam pelaksanaan tersebut, maka mereka akan menyampaikan kepada Ketua Tim Pangan Desa. Kemudian, Ketua Tim Pangan Desa inilah yang akan meneruskan usulan tersebut kepada PPL untuk di sampaikan kepada Dinas Pertanian...

3.2 Kelengkapan Sarana Dari Pemerintah

Pada perencanaan awal program ini bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pertanian adalah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa jenis tanaman padi yang akan dikelola di Desa Kepenuhan Hulu ini adalah jenis tanaman padi sawah. Sementara itu, pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan jenis padi sawah ini belum mendalam. Ketersediaan lahan pertanian untuk Program Desa Mandiri Pangan di Desa Kepenuhan Hulu ini memang untuk saat ini masih minim. Rendahnya minat masyarakat untuk bertani dengan system persawahan menjadi suatu kendala terlaksananya program ini.

3.3 Kondisi Lingkungan

Dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan ini tentu pelaksana utamanya adalah Dinas Pertanian dan Petani. Pelaksanaan oleh Dinas Pertanian tentu sebagai fasilitator bagi kebutuhan petani, diantaranya menyediakan penadamping lapangan untuk para petani agar bisa membantu kendala yang dialami petani nantinya dalam hal mengelola padi. Kemudian menyediakan kebutuhan-kebutuhan petani yang terkait dengan tanaman seperti pupuk, bajak untuk mengolah sawah, racun hama, bibit, serta mesin penggiling padi untuk panen.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan yang telah berjalan lebih kurang dari dua tahun ini hal tersebut diatas belum dilakukan sama sekali. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh petani yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pengalaman dalam mengelola padi sawah. Dari dulu hingga sekarang kami bertanam padi dengan cara ladang. Sementara, pengelolaan padi ladang dengan padi sawah itu berbeda jauh. Sementara, pemerintah yang merencanakan program ini sampai saat ini tidak ada melakukan semacam penyuluhan atau pelatihan awal sebagai bekal untuk menanam nantinya.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Petani melalui hasil wawancara dapat dikatakan bahwa pemerintah hanya menetapkan perencanaan dengan target sekian dalam waktu sekian, akan tetapi untuk tindak lanjut pelaksanaannya tidak ada pengawasan dan penanganan yang betul-betul komitmen dengan masyarakat. Sehingga, menimbulkan kesadaran yang kurang dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini.

Pelaksanaan oleh petani merupakan pelaksanaan inti dari terwujudnya program ini. Karena jika petani tidak melaksanakan sama sekali, maka tidak akan ada produksi seperti apa yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Dari fakta yang didapat di lapangan sikap masyarakat/para petani dalam program ini bisa disimpulkan manja. Karena, mereka menunggu didorong oleh instansi yang bersangkutan dulu baru akan sedikit termotivasi untuk melaksanakan.

4. Hal-hal Yang Mempengaruhi Pelaksanaan

Belum tercapainya target perencanaan dari pelaksanaan yang telah dilakukan karena dalam pelaksanaan terdapat beberapa hambatan, yaitu;

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan. Kebijakan atau perencanaan yang dibuat oleh pemerintah tentunya harus disosialisasikan kepada masyarakat dan instansi terkait agar dalam pelaksanaannya tercipta kerjasama yang baik hingga mendapatkan hasil yang baik. Dalam permasalahan pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Kepenuhan Hulu ini komunikasi yang terjadi tidak ada antar pelaksana dengan petani. Sehingga, hal ini menjadi salah satu faktor hambatan mengapa pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Kepenuhan Hulu ini tidak terlaksana sama sekali.

Sosialisasi mengenai pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan ini belum dilakukan dengan baik. Mulai dari penetapan Penyuluh Pertanian Lapangan pendamping Kecamatan, penetapan rumah tangga sasaran yang akan mengelola sawah, sarana dan prasarana pertanian hingga ketersediaan bibit padi dan lahan. Komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Untuk pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Kepenuhan Hulu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan belum terlaksana. Hingga saat ini yang Nampak pelaksanaannya hanya lahan yang ada sekitar 10 petak sawah, dan itupun belum pernah ditanami padi sama sekali sejak tahun 2012 lalu. Juga belum ditentukan rumah tangga sasaran atau petani yang akan menanaminya.

Komunikasi antar pelaksana dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan ini sangat penting karena itu akan ikut menentukan berhasil atau tidaknya implemtnasi dari program ini. Menurut **Uchjana (1999)** komunikasi yang tercipta dalam organisasi yakni antara pimpinan dan bawahan terbagi atas:

1. Komunikasi Vertikal, yaitu komunikasi dari atas kebawah yakni komunikasi dari pimpinan ke bawahan dan dari bawahan ke pemimpin. Komunikasi ini sangat penting sekali karena terjadi timbal balik sehingga pimpinan dapat mengetahui laporan,

tanggapan, gagasan atau saran dari pegawai bawahan sebagai petunjuk efektif atau tidaknya kebijaksanaan yang dijalankan.

2. Komunikasi horizontal adalah komunikasi secara mendatar yakni antara sesama anggota staf atau pegawai, pegawai tingkat menengah dengan tingkat menengah, pegawai tingkat menengah dengan pegawai rendah atau pegawai rendah dengan pegawai rendah pula.
3. Komunikasi diagonal yaitu komunikasi dalam organisasi antara seseorang dengan orang lain yang berbeda kedudukan dan bagian yang dipegang.

Berdasarkan acuan konsep diatas dan dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka pola komunikasi yang terjadi horizontal. Tidak ada terjalin komunikasi dua arah.

Komunikasi yang meliputi bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan pada organisasi dan public, ketersediaan sumber daya, sikap dan daya tanggap pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sesuai dengan konsep Edwards tersebut mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Kepenuhan Hulu pada tahun 2012 belum tercipta iklim komunikasi yang baik antarpelaksana, kebijakan belum bisa dikomunikasikan dengan baik oleh pembuat kebijakan serta sikap dan daya tanggap pihak yang terlibat masih sangat kurang. Keinginan untuk mewujudkan program tersebut belum tampak secara serius sama sekali

2. Sumber-sumber

Kejelasan sumber-sumber seperti perintah-perintah implementasi dari atasan kepada bawahan. Jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka pelaksanaan suatu program akan cenderung tidak efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai disertai keahlian-keahlian, fasilitas dan informasi mengenai kebijakan-kebijakan program baru.

3. Kecenderungan-kecenderungan (sikap pelaksana)

Sikap para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan juga merupakan faktor penting berikutnya yang harus ada dalam suatu kegiatan implementasi kebijakan agar berhasil dan efektif. Kesiapan dan kesiapan dari pelaksana akan menunjukkan hasil yang baik. Sebab, kecakapan pelaksanaan tidak cukup tanpa kesiapan dan komitmen dari pelaksana. Kesiapan dan komitmen disini bisa disebut dengan yang namanya *Political will*. Untuk pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Kepenuhan Hulu dalam aspek ini juga belum terwujud sama sekali.

4. Struktur birokrasi

Faktor penting selanjutnya yang ikut menentukan berhasilnya suatu implementasi kebijakan yang diuraikan oleh Edwards adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini meliputi prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Kepenuhan Hulu memang telah ada dikeluarkan prosedur-prosedur kerja. Akan tetapi, prosedur kerja yang dikeluarkan adalah tentang mekanisme pengajuan proposal atau usulan dari para petani. Seperti misalnya para petani menginginkan bibit dari pemerintah, maka mereka harus mengajukan proposal atau usulan

melalui pendamping kecamatan dari Dinas Pertanian. Sementara, prosedur kerja tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan program, siapa yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut hingga saat ini belum bisa dijelaskan.

Struktur birokrasi dengan pembagian dan arah kerja yang jelas tentu akan mendukung pelaksanaan program ataupun kebijakan apapun. Namun, hal yang sering terjadi adalah kadang-kadang struktur atau arah kerja yang telah ditetapkanlah yang menjadi hambatan terlaksananya suatu program atau kebijakan. Dengan hal demikian, masyarakat pun enggan berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Urusan yang berbelit-belit akan membuat berhentinya suatu pelaksanaan sebuah kegiatan.

5. Upaya Tindak Lanjut Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Kepenuhan Hulu

5.1 Optimalisasi Anggaran

Tindak lanjut terhadap pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan ini Dinas terkait sudah membuat perencanaan ulang serta untuk anggaran juga dalam tahap proses. Kalau dulu itu hanya mengandalkan dana dari Pemerintah Provinsi untuk selanjutnya akan di usahakan ada anggaran dari APBD Rohul sendiri agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik tidak ada lagi terhambat masalah anggaran. Optimalisasi anggaran merupakan penghematan dan penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tidak digunakan untuk hal lain diluar perencanaan.

5.2 Efektivitas Pemanfaatan Lahan

Tindak lanjut selanjutnya yang dibuat dalam perencanaan ulang yang telah disusun adalah efektivitas pemanfaatan lahan. Wacana ini dicanangkan karena adanya keterbatasan lahan masyarakat yang akan dijadikan lahan untuk persawahan. Menurut bapak Samadi PPL pertanian Desa Kepenuhan Hulu mengatakan, dalam hal ini kita nantinya akan mencoba bagaimana dalam lahan yang terbatas tetapi bisa melakukan panen tiga kali dalam setahun. Untuk terwujudnya ini nanti tentunya harus ada kerjasama semua pihak, terutama dengan petani. Mereka nantinya akan diberikan penyuluhan khusus oleh tenaga ahli. Diharapkan dengan adanya hal ini akan membuat petani lebih kreatif dan hasil produksi meningkat.

Ucapan Terima Kasih

Terselenggaranya penelitian ini tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Bantuan baik berupa moril maupun materiil.

1. Ucapan terima kasih kepada bapak Ir. Ruslan selaku Kepala Badan Tanaman Pangan Dinas Pertanian, bapak Samadi selaku PPL Dinas Pertanian untuk Kecamatan Kepenuhan Hulu, bapak H. A. Rahman selaku Kepala Desa demisioner dan bapak Zulkarnain selaku Kepala Desa yang telah banyak memberikan informasi dan data dalam kegiatan penelitian ini.
2. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada bapak Drs. H. Muhammad Ridwan selaku pembimbing yang dengan sabar membimbing saya dalam penelitian ini. Terima kasih atas saran, pikiran dan waktu yang telah diberikan.
3. Ucapan terima kasih kepada petani Desa Kepenuhan Hulu.

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budi Winarno.2002.*Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Jakarta: Media Pressindo).
Uchjana dalam Eddy Wibowo.2005. *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. Yogyakarta: BPEE. Dikutip dari Norman Husein 2012.
Satori. Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 272 Tahun 2011 tentang Desa Tertinggal